

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

Riris Katharina

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2018

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua /Riris Katharina—Ed. 1; Cet. 1.—
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

xvi + 252 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-655-4

Judul:
Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua
Riris Katharina

Copyrights © 2018
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018
YOI: 1543.36.97.2018
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114
Faksimile: +62 (0)21-31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
Website: [//www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

*Buku ini kupersembahkan untuk anak-anak Papua
dan anakku Reynnalda Alisha*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanNya Penulis akhirnya dapat menyelesaikan buku ini. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagiNya.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan hingga tahun 2017. Tulisan ini sangat diilhami oleh pengalaman penulis dalam mendukung Tim Pemantau Otsus Papua di DPR RI, di bawah pimpinan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Priyo Budi Santoso (2009-2014), dan dilanjutkan oleh Bapak Fadli Zon (2014-2019).

Dalam perjalanan Penulis selama mengikuti Tim Pemantau Otsus DPR RI ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Penulis selalu bertanya-tanya mengapa Papua yang kaya dan sudah diberikan status otonomi khusus, namun tetap tertinggal dari provinsi lainnya? Mengapa selalu muncul kehendak merdeka dari anak-anak Papua? Mengapa setiap ditanya mengenai Otsus mereka anggap Otsus itu hanya sebuah proyek buatan Jakarta? Apa yang salah? Pertanyaan yang terus menggelitik pikiran Penulis telah mendorong Penulis memutuskan untuk melakukan riset dalam perspektif ilmu Penulis, yaitu ilmu kebijakan publik.

Tulisan ini diberi judul *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua* dengan maksud untuk mengundang para pembaca memberikan reaksinya terhadap pernyataan yang selalu dilontarkan berbagai pihak mengenai Otsus Papua. Dalam banyak pendapat, Otsus gagal sudah sering dilontarkan. Namun tampaknya Pemerintah tidak bisa menerima pernyataan tersebut. Dalam perspektif Pemerintah, Otonomi Khusus Papua telah menunjukkan beberapa pencapaian.

Namun, dalam perspektif Penulis, pendapat berbagai pihak yang mulai pesimis terhadap keberhasilan kebijakan Otsus di Papua harus mulai dipertimbangkan. Dapat Penulis katakan bahwa apabila tujuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kebijakan Otsus berhasil atau tidak, maka dapat dipastikan Otsus di Papua sudah gagal. Ditambah lagi, dalam perspektif ilmu kebijakan publik, kebijakan Otsus yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam implementasinya sudah pasti akan mengakibatkan kegagalan. Namun, dalam perkembangannya diakui sudah terjadi peningkatan dalam bidang pembangunan di Papua.

Tulisan ini bermaksud memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021 dapat dijadikan sebagai momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama ini. Proses ini jangan dianggap sebagai pintu referendum bagi lepasnya Papua, melainkan pintu menciptakan relasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta dengan orang asli Papua. Dengan demikian, Penulis berharap apa yang menjadi cita-cita orang asli Papua untuk mendapatkan keadilan, penegakan hukum dan HAM, serta kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Papua dapat segera tercapai.

Akhir kata, Penulis menyadari ada banyak kekurangan yang Penulis rasakan. Untuk itu, Penulis minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, terutama dari orang asli Papua yang telah menjadi objek tulisan ini. Niat Penulis hanya ingin melihat Papua ke depan lebih sejahtera, maju, dan memperoleh keadilan. Tuhan memberkati Tanah Papua...

Jakarta, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB 1 OTONOMI KHUSUS PAPUA	1
BAB 2 OTONOMI KHUSUS SEBAGAI SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK	23
A. <i>Deliberative Public Policy</i> dalam Studi Kebijakan Publik	26
B. Implementasi Kebijakan	29
C. Otonomi Khusus (<i>Asymmetrical Decentralization</i>)	41
BAB 3 GAMBARAN PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT, DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	55
A. Gambaran Umum Provinsi Papua	55
B. Gambaran Umum Provinsi Papua Barat	65
C. Gambaran Umum Otonomi Khusus Papua	68
BAB 4 CAPAIAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	79
A. Lambang-lambang	79

B. Pembagian Daerah	80
C. Kewenangan Daerah	84
D. Pemerintahan	85
1. DPRD	85
2. Gubernur/Wakil Gubernur	93
3. MRP	101
4. DPRD Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota; Beserta Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota; Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung	104
E. Kepegawaian	105
F. Partai Politik	109
G. Komisi Hukum <i>Ad Hoc</i>	109
H. Keuangan	110
I. Perekonomian	117
J. Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat	123
K. Hak Asasi Manusia	125
L. Kepolisian Daerah Provinsi Papua	129
M. Kekuasaan Peradilan	130
N. Keagamaan	130
O. Pendidikan dan Kebudayaan	131
P. Kesehatan	136
Q. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	138
R. Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup	139
S. Sosial	140
T. Pengawasan	140
U. Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan	141
V. Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang	142
W. Pemekaran Provinsi Papua	143
X. Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001	144

Y. Evaluasi UU Nomor 21 Tahun 2001	145
------------------------------------	-----

BAB 5 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTSUS PAPUA	146
--	-----

A. Aktor	146
1. Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001- 20 Oktober 2004)	147
2. Presiden SBY (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014)	149
3. Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014- sekarang)	161
4. DPR RI	167
5. DPD RI	171
6. Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat	174
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan DPR Papua Barat	175
8. Majelis Rakyat Papua (MRP)	176
9. Penghubung: Bupati dan Walikota	176
10. Individu Berpengaruh: Tokoh Masyarakat	177
11. Penerima Manfaat	179
12. Media Massa	183
13. Kelompok Kepentingan: Evaluator dan Pro- Merdeka	184
B. Struktur Organisasi dan Norma Birokrasi	188
1. Prosedur Internal Organisasi	188
2. Alokasi Sumber Daya	190
3. Motivasi Psikologi dan Norma Birokrasi	193
4. Jaringan Komunikasi dan Mekanisme Kepatuhan	194

BAB 6 OTONOMI KHUSUS PAPUA GAGAL?	206
A. Aktor	212
B. Struktur Organisasi dan Norma Birokrasi	214
C. Jaringan Komunikasi dan Mekanisme Kepatuhan	216
D. Sumbangan dari Konteks dan Konten Kebijakan	217
E. Sumbangan dari Tahap Formulasi Kebijakan	218
BAB 7 PENUTUP	226
DAFTAR PUSTAKA	232
INDEKS	247
TENTANG PENULIS	251

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	8
Tabel 2	Jumlah Gedung Sekolah di Provinsi Papua	9
Tabel 3	Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat	10
Tabel 4	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan Tahun 2002-2005 di Provinsi Papua	11
Tabel 5	Perkembangan Jumlah Kendaraan dari Tahun 2002-2004	11
Tabel 6	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat	13
Tabel 7	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	14
Tabel 8	Angka Melek Huruf Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	15
Tabel 9	Peringkat 5 Terendah IPM Berdasarkan Provinsi di Indonesia	16
Tabel 10	<i>Governance After Modernism</i>	28
Tabel 11	Perbandingan Teori <i>Top-Down</i> dan <i>Bottom-Up</i>	33
Tabel 12	Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	56
Tabel 13	Wilayah Adat Papua	59
Tabel 14	Jumlah Penduduk Provinsi Papua	61
Tabel 15	Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	67
Tabel 16	Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat	68
Tabel 17	Substansi Kekhususan bagi Provinsi Papua	73

Tabel 18	Daftar Jumlah Distrik dan Kampung di Provinsi Papua	80
Tabel 19	Daftar Jumlah Distrik dan Kampung di Provinsi Papua Barat	82
Tabel 20	Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua Pasca-UU Otsus Papua	82
Tabel 21	Perintah Perdasi dan Perdasus dalam UU Nomor 21 Tahun 2001	86
Tabel 22	Perdasi/Perdasus yang telah Dibentuk Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001	88
Tabel 23	Terobosan Strategis Gubernur Papua Lukas Enembe	98
Tabel 24	Jumlah PNS Provinsi Papua	107
Tabel 25	Jumlah PNS Provinsi Papua Berdasarkan Papua-Non-Papua	108
Tabel 26	Jumlah PNS Provinsi Papua Barat	108
Tabel 27	Perkembangan Alokasi Anggaran K/L Untuk Papua Tahun 2011-2014	111
Tabel 28	Pembagian dan Alokasi Dana Otsus Tahun 2015	113
Tabel 29	Pembagian dan Alokasi Dana Otsus Tahun 2016	114
Tabel 30	Formula Pembagian Dana Otsus	115
Tabel 31	Angka Melek Huruf Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	132
Tabel 32	Jumlah Sekolah dan Guru di Provinsi Irian Jaya Tahun 1986	133
Tabel 33	Kondisi Pendidikan di Provinsi Irian Jaya Tahun 1997	134
Tabel 34	Kondisi Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013	134
Tabel 35	Perintah Peraturan Pemerintah dalam UU Nomor 21 Tahun 2001	142
Tabel 36	Kegiatan Presiden Jokowi di Papua	162
Tabel 37	Tim Kerja RUU Otsus Papua DPD RI	172

Tabel 38	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota	179
Tabel 39	Hasil Evaluasi Berbagai Pihak terhadap Kegagalan Otsus Papua	184
Tabel 40	Capaian Tujuan Otsus	201
Tabel 41	Kaitan Otsus dan Masalah	224

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lingkungan Implementasi Kebijakan	31
Gambar 2	Lingkungan Implementasi Kebijakan Penelitian	40
Gambar 3	Asimetris dalam Perspektif Tarlton	47
Gambar 4	Wilayah Adat Papua	61
Gambar 5	Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Provinsi Tahun 2014	137
Gambar 6	IPM Provinsi Papua Masa Megawati	149
Gambar 7	IPM Provinsi Papua 2004-2013	160

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Papua Tahun 1999-Maret 2016	12
Grafik 2	Perbandingan APS Usia 7-12 Tahun Nasional – Provinsi Papua – Provinsi Papua Barat	18

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adian, Donny Gahral. 2010. *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme*. Depok: Penerbit Koekoesan.
- Araf, Al. 2011. *Sekuritisasi Papua*. Jakarta: Imparsial.
- Benington, John & Moore, Mark H. 2011. *Public Value Theory & Practice*. Great Britain: Playgrave MacMillan.
- Bhakti, Ikrar Nusa (ed.). 2015. *Gunung versus Pantai Dalam Perspektif Nilai-Nilai Hidup Bersama*. Yogyakarta: Penerbit asdaMedia.
- Blindenbacher, Raoul & Koller, Arnold. 2003. *Federalism in a Changing World: Learning from Each Other*. Montreal: McGill-Queens University Press.
- Boediardjo. 1999. *Siapa Sudi Saya Dongengi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Clemos, Randy S. & McBeth, Mark K. 2009. *Public Policy Praxis: A Case Approach for Understanding and Analysis*. USA: Pearson Education Inc., Second Edition.
- Conoras, Yusman (ed.). 2008. *MRP Kitong Pu Honai*. Jayapura: Foker LSM Papua.
- Dahl, Robert A. 2009. *Dilema Demokrasi Pluralis; Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: C.V Rajawali.
- _____. 2000. *On Democracy*, Yale: Yale University Press.
- Direktorat Organisasi Internasional. 1998. *Sejarah Kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Dryzek, John S. 2000. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Edward III, George C. 1980. *“Implementing Public Policy”*. Washington DC USA: Congressional Quarterly Press.
- Elisabeth, Adriana. 2005. *Agenda dan Potensi Damai di Papua*. Jakarta: LIPI Press.
- Fischer, Frank. *et.al*. 2007. *“Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods”*. Florida: CRC Press.

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

- Gastil, John & Levine, Peter. (ed.). 2005. *The Deliberative Democracy Handbook*. USA: Jossey-Bass.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: University Press, Princeton.
- Gurr, Tedd. 2000. *People versus State: Minorities at Risk in the New Century*. Washington DC: US Institute of Peace.
- Ham, Christopher & Hill, Michael. 1984. *"The Policy Process in the Modern Capitalist State"*. Great Britain: Harvester Press Group.
- Hardiman, Budi F. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hirst, Paul Q. 1989. *The Pluralist Theory of the State*. USA: Routledge.
- Kay, Adrian. 2006. *"The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence"*. UK: Edward Elgar Publishing.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Kinerja Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Tahun 2013: Sebuah Evaluasi Sistemik, Terpadu-Komprehensif, dan Partisipatif atas Kinerja Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- _____ . 2012. *Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat: Refleksi Sebelas Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. *Papua Barat: Samudra Pasifik dan Laut Seram di Kepala Burung Papua*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kraft, Michael E & Furlong, Scott R. 2013. *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. USA: CQ Press.
- Leirissa, R.Z. et.al. 1992. *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Majelis Rakyat Papua. 2013. *Evaluasi Otonomi Khusus*. Jayapura: Majelis Rakyat Papua.
- _____ . 2013. *Implementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Pengalaman Empirik Orang Asli Papua*. Jayapura: Majelis Rakyat Papua.

- _____. 2013. *Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Dimensi Keberlakuan Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis*. Jayapura: MRP.
- McNabb, David E. 2009. *The New Face of Government: How Public Manager are Forging a New Approach to Governance*. USA: CRC Press.
- Meteray, Bernarda. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Morton, Deutsch & Coleman, Peter T. 2000. *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*. San Francisco: A Wiley Imprint.
- Muller, Karl. 2008. *Mengenal Papua*. Indonesia: Daisy World Books.
- Nakamura, Robert T. & Smallwood, Franks. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. AS: St. Martin's Press.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2011. *The Indonesian Military Response to Reform in Democratic Transition: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- _____. 2003 *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Numberi, Freddy. 2013. *Quo Vadis Papua*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Pahabol, Daniel. 2014. *Visi Gubernur Papua Bangkit, Mandiri & Sejahtera: Maju Menghadapi Tantangan Pandang Menembus Dinding Perbedaan*. Jayapura: Percetakan Rakyat Papua.
- Parson, Wayne. 2001. *Public Policy (terj.)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rasyid, Ryaas. 2007. "Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan" dalam *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Sarundajang, S.H. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saward, Michael. 2000. *Democratic Innovation*. London: Routledge.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. 2002. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

- Solossa, Jacobus Perviddya. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Matapena Institut.
- Widjojo, Muridan S. 2009. *Papua Road Map*. Jakarta: LIPI Press.

Jurnal

- Bahl, Roy. & Vazquez, Jorge Martinez. 2006. "Sequencing Fiscal Decentralization". World Bank Policy Research Working Paper 3914. World Bank: Washington DC. May.
- Bevir, Mark. 2011. "Democratic Governance: A Genealogy". *Local Government Studies*. Vol. 37, No. 1, 3-17 February, Routledge Taylor & Francis.
- Bhatia, Udit. 2013. "Deliberative Democracy and Illiteracy: Exploring a Theoretical Gap". *Journal of Public Deliberation*. Volume 9, Issue 2, Article 17.
- Blau, Adrian. 2011. "Rationality and Deliberative Democracy: A Constructive Critique of John Dryzek's Democratic Theory". *Contemporary Political Theory* 10. Macmillan Publishers.
- deLeon, Peter & Varda, Danielle M. 2009. "Toward a Theory of Collaborative Policy Network: Identifying Structural Tendencies", *Policy Studies Journal*. ProQuest. Feb 2009:37. No. 1.
- Fishkin, James S. 2011. "Deliberative Democracy and Constitutions". *Social Philosophy & Policy*, 28 (1).
- Hartz-Karp, Janette & Carson, Lyn. "Putting the People into Politics: The Australian Citizens' Parliament". *The International Journal of Public Participation* Volume 3 Number 1, July.
- He, Baogang. 2010. "A Deliberative Approach to Tibet Autonom Issue Promoting Mutual Trust through Dialogue". *Asian Survey*. Vol. 50, Number 4.
- James Farr. Hacker, Jacob S. Kazee, Nicole. 2006. "The Policy Scientist of Democracy: The Dicine of Harold D. Lasswell". *The American Political Science Review*, Nov, 100, 4.
- Kadlec, Alison & Friedman, Will. 2007. "Deliberative Democracy and the Problem of Power". *Journal of Public Deliberation*. Volume 3, Issue 1.
- Kasim, Azhar. 2001. "Perubahan Pendekatan Ilmu Administrasi Publik dan Implikasinya terhadap Studi Kebijakan". *Jurnal Bisnis & Birokrasi*

- Volume IX/Nomor 3/September/2001*. Jakarta: FISIP, Universitas Indonesia.
- Katharina, Riris. 2017. Deliberative Formulation of Papua Special Autonomy Policy, *International Journal of Administrative Sciences & Organization*, University of Indonesia.
- Klintman, Mikael. 2009. "Participation in Green Consumer Policies: Deliberative Democracy under Wrong Conditions?" *J Consum Policy* (32), Springer Science + Business Media, LLC.
- Mayabubun, Kenny & Conoras, Yusman. 8 Januari 2010. "Pembangunan Kesehatan di Era Otonomi Khusus Papua: Catatan Satu Tahun Terakhir". *Jaringan dan Partisipan*.
- McGarry, John. 2007. "Asymmetry in Federations, Federacies, and Unitary States". *Ethnopolitics*. Vol. 6, No. 1, 105-116, March.
- McGibbon, Rodd. 2004. "Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?" *Policy Studies* 10, East-West Center: Washington D.C.
- McWilliam, Andrew. 2011. "Marginal Governance in the time of Pemekaran: Case Study from Sulawesi and West Papua". *Asian Journal of Social Science* 39.
- Musa'ad, Mohammad A. 2011. "Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan". *Jurnal Kajian*. Vol. 16, No. 2, Juni. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- O'Donnell, Guillermo. 1994. *Journal of Democracy* 5, No. 1, January.
- Sharma, Chanchal Kumar. 2006. "Decentralization Dilemma: Measuring the Degree and Evaluating the Outcomes". *Indian Journal of Political Science*. Vol. LXVII, No. 1, Jan-Mar.

Koran

- Al-Makassary, Ridwan. 12 Agustus 2015. *Papua Pos*. "Keadilan Restoratif untuk Insiden Tolikara 17 Juli 2015".
- Djohan, Djohermansyah. 10 Oktober 2016. "Repotnya Otonomi Daerah". *Kompas*.
- "Dipertanyakan, Opini WTP untuk 7 Kabupaten di Papua". 16 Juni 2016. *Suara Pembaruan*.
- "Guru Absen di Papua Butuh Solusi". 3 Maret 2014. *Kompas*.

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

- “Jakarta Tidak Serius Tangani Papua”. 20 Juni 2010. *Media Indonesia*.
- Maksum, Irfan Ridwan. 28 Januari 2014. “Spektrum Otonomi Kekhususan”. *Kompas*.
_____. 14 November 2011. Desain Ulang Otonomi Papua. *Kompas*.
- “Mendagri Nilai MRP Bahayakan Stabilitas Keamanan di Papua”. 15 April 2003. *Suara Karya*.
- “Mendagri Hari Sabarno Soal MRP: Jangan Bikin Negara dalam Negara”. 28 Juni 2003. *Suara Pembaruan*.
- Otsus Tak Berpengaruh, *Kompas*, 8 Maret 2014, hlm. 22.
- Saleh, Ridha M. 3 November 2011. *Kompas*. “Saudara Presiden, Datanglah ke Papua”.
- Tebay, Neles. 29 Juni 2010. “Rakyat Mengevaluasi Otsus Papua”. *Suara Pembaruan*.

Makalah

- Badan Intelijen Negara. 2016. “Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi untuk Papua”. Jakarta: LIPI. 27 Januari.
- Dardias, Bayu. *et.al.* 2010. *Model Implementasi Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan: Belajar dari Pengalaman Aceh dan Papua*. Yogyakarta: UGM, sebuah makalah.
- Diamar, Son. 2014. “Relasi Kerja UP4B dan Lembaga Pelaksana Otsus Papua”. Sebuah makalah dalam forum FGD yang diselenggarakan oleh Setjen DPR RI pada tanggal 21 Agustus 2014.
- Fox, William F. 2007. *Fiscal Decentralization in Post-Conflict Countries*. Washington, DC: US Agency for International Development, December.
- Jennie, Litvack. *et.al.* 1998. *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington, DC: World Bank.
- Lay, Cornelis. 2010. “Desentralisasi Asimetris Bagi Indonesia”. Makalah dalam Seminar Nasional Menata Ulang Desentralisasi dari Perspektif Daerah. Yogyakarta. 25 Januari.
- Perkasa, Vindhyanikan D. 2013. Intrusi Tradisionalisme yang Terdistorsi dalam Struktur Birokrasi Modern: Fenomena Tata Pemerintahan yang Lemah dan Buruk di Papua. Sebuah makalah, dipresentasikan dalam FGD 29 Mei 2013 di Hotel Borobudur, Jakarta.
- Prasojo, Eko. 1999. *The Problem of Regional Proliferation in Indonesia After Big Bang Decentralization*. Sebuah makalah.

- Sugiyono, Bambang. 2010. *Disain dan Praktek Desentralisasi: Refleksi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua*. Makalah dalam Seminar Nasional: Menata Ulang Desentralisasi dari Perspektif Daerah. Yogyakarta. 25 Januari.
- Vatanasapt, Vanchai. 2006. *“Peace and Sustained Democracy”*. Thailand: King Prajadhipok’s Institute.

Dokumen Resmi

- Aulia, Siti Nur. 2016. “Penangkalan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Menghadapi Propaganda Internasional Papua Merdeka pada Kurun Waktu Tahun 2009-2015”. *Tesis*. Bogor: Fakultas Strategi Pertahanan, Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.
- BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2016.
- BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2015.
- DPR RI. 2014, Laporan Tim Pemantau Otsus dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2014.
- ICP. 2015. *Human Rights in West Papua 2015*, The Fourth Report of the International Coalition for Papua (ICP) covering for April 2013 until December 2014.
- Jaweng, Robertus Na Endi. 2012. *Analisis Kewenangan Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia*. Sebuah tesis. Jakarta: FISIP UI.
- Pemerintah Provinsi Papua. 2016. Bahan Tayang. Penjelasan Wakil Gubernur Papua di hadapan Tim Pemantau UU Nomor 21 Tahun 2001 DPR RI pada tanggal 15 Juni 2016 di Jayapura.
- Pidato Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus 2005.
- Pusat Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah Uncen dan Pemerintah Provinsi Papua. 2013. *Kajian Pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat Asli Papua*. Jayapura.
- Menteri Dalam Negeri. 2010. Penjelasan Tertulis Menteri Dalam Negeri pada Rapat Kerja dengan Tim Pemantau terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Jakarta, 23 Juli.

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

- Menteri Koordinator Perekonomian. 2013. Laporan Tertulis Menkoperekonomian Kepada Tim Pemantau Otsus Papua. 5 Juli.
- UP4B. 2014. "Laporan UP4B Akhir Tahun 2013". Jayapura: Kantor Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- White, Stacey. 2011. *Government Decentralization in the 21st Century: A Literature Review*. Washington DC:CSIS.

Peraturan Perundang-Undangan

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004.
- Perdasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Komisi Hukum *Ad Hoc*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Media Online

- "10 Putusan Mahkamah Konstitusi Terpilih".<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11934/10-putusan-mahkamah-konstitusi-terpilih>, diakses tanggal 6 Desember 2016.
- Abdul Gaffar Karim. "No Asymmetrical Decentralization Design in Indonesia".<http://www.ugm.ac.id/id/news/5238-no.asymmetrical.decentralization.design.In.indonesia>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- "About Papua New Guinea".http://www.pg.undp.org/content/papua_new_guinea/en/home/countryinfo.html. Diakses pada tanggal 21 November 2016.
- "Alasan Dibalik Kekecewaan Lukas Enembe RUU Otsus Plus dan Pilkada Tahun 2015".<https://westpapuainfo.wordpress.com/2015/03/14/alasan-dibalik-kekecewaan-lukas-enembe-ruu-otsus-plus-dan-pilkada-tahun-2015/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2016.
- "Angka Kematian Ibu di Papua Tertinggi Ketiga Nasional".<http://tabloidjubi.com/2014/04/08/angka-kematian-ibu-di-papua-teritinggi-ketiga-nasional/>. Diakses pada tanggal 19 April 2016.

- Badan Pusat Statistik.<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26>.Diakses pada tanggal 17 November 2016.
- “Bertentangan dengan UU, Presiden Diminta bubarkan Tim Terpadu HAM”.
<http://tabloidjubi.com/2016/06/24/bertentangan-dengan-uu-presiden-diminta-bubarkan-tim-terpadu-ham-papua/>.Diakses pada tanggal 17 Juli 2016.
- “BPS, Indikator Kesehatan 1995-2015”.<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1559>.Diakses pada tanggal 19 April 2016.
- “Dana Otonomi Khusus Besar Luhut Heran Papua Masih Bergejolak”.
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160219131213-20-112052/dana-otonomi-khusus-besar-luhut-heran-papua-masih-bergejolak/>.
Diakses pada tanggal 17 Juli 2016.
- “Dana untuk Papua Tertinggi, Angka Kemiskinan Tertinggi, Apa yang Salah?”http://www.papubaratnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:dana-untuk-papua-tertinggi-angka-kemiskinan-tertinggi--apa-yang-salah-&catid=78:keuangan-&Itemid=471.Diakses pada tanggal 14 Oktober 2010.
- “Database Kesehatan Per-Provinsi”.
<http://www.bankdata.depkes.go.id/nasional/public/report/createtablepti>.Diakses tanggal 21 November 2016.
- “Desain Kebijakan SBY untuk Papua”.<https://nasional.tempo.co/read/news/2012/06/18/173411195/desain-kebijakan-sby-untuk-papua>.Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.
- “Diusulkan Gubernur Papua Barat Bentuk Komisi Ad Hoc”.<https://www.pasificpos.com/papua-barat/9517-diusulkan-gubernur-papua-barat-bentuk-komisi-ad-hoc>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- “Evaluasi Dampak Penerima Manfaat dari PNPM Respek di Papua dan Papua Barat”.<http://www.akatiga.org/index.php/penelitian/galeri-penelitian/238-evaluasi-dampak-penerima-manfaat-dari-pnpm-respek-di-papua-dan-papua-barat>.Diakses pada tanggal 16 Juli 2016.
- “Freeport Keberatan Bayar Pajak Rp2,7 Triliun ke Pemprov Papua”.<http://industri.bisnis.com/read/20140805/44/247635/freeport-keberatan-bayar-pajak-rp27-triliun-ke-pemprov-papua>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- “Gubernur Papua Adukan Dugaan Korupsi Dana Otsus ke DPR”.<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/06/1344034/Gubernur.Papua>.

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

- Adukan.Dugaan.Korupsi.Dana.Otsus.ke.DPR*.Diakses pada tanggal 18 Juli 2016.
- “Gubernur Papua Ancam Potong Anggaran”.<http://www.beritapapua.dharapos.com/2015/01/gubernur-papua-ancam-potong-anggaran.html>.Diakses pada tanggal 18 Juli 2017.
- “Gubernur Papua Bantah Dukung Unjuk Rasa Penutupan Freeport”.http://regional.kompas.com/read/2016/03/01/04050011/Gubernur.Papua.Bantah.Dukung.Unjuk.Rasa.Penutupan.Freeport?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&.Diakses pada tanggal 12 Mei 2016.
- “Gubernur Papua Pertahankan Skema Pembagian Dana Otsus”.<http://www.antarapapua.com/berita/453950/gubernur-papua-pertahankan-skema-pembagian-dana-otsus>.Diakses pada tanggal 16 Juli 2016.
- “Harga BBM Papua sama dengan di Jawa, Rini: Tercapai Setelah 70 Tahun Merdeka”.<http://finance.detik.com/energi/d-3336813/harga-bbm-papua-sama-dengan-di-jawa-rini-tercapai-setelah-70-tahun-merdeka>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- Hasbullah, Meoflich. Potret Komposisi Etnis dan Agama di Indonesia pada Milenium Kedua, http://www.academia.edu/3638968/Potret_Komposisi-Etnis-dan-Agama-di-Indonesia-pada-Milenium-Kedua.Diakses pada tanggal 1 Maret 2016.
- “HIV/AIDS di Papua Mengkhawatirkan”.<http://www.aidsindonesia.or.id/news/1424/22/18/06/2010/#sthash.ikgByrrv.eyglC6jb.dpbs>.Diakses pada tanggal 23 November 2016.
- “Indeks Pembangunan Manusia IPM Metode Baru yang Terbaik dan yang Tercepat”. <https://indonesiana.tempo.co/read/53491/2015/11/04/kadirsst/indeks-pembangunan-manusia-ipm-metode-baru-yang-terbaik-dan-yang-tercepat>.Diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- “Indeks Pembangunan Papua (IPM) Provinsi Papua Tahun 2015”.http://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160615101238.pdf.Diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- “Indikator Penting Provinsi Papua Edisi Oktober 2016”.http://papua.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Indikator-Penting-Provinsi-Papua-Edisi-Oktober-2016.pdf.”Diakses pada tanggal 21 November 2016.

- "Ini Salah Satu Cara Mendorong Perekonomian Daerah di Papua".<http://kabarpapua.co/ini-salah-satu-cara-mendorong-perekonomian-daerah-di-papua/>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- "IPM Papua Barat Terus Meningkatkan".<http://papuanews.id/2016/12/03/ipm-papua-barat-terus-meningkat/>.Diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- "Isi Lengkap Pidato Kenegaraan Perdana Presiden Jokowi".<http://news.liputan6.com/read/2293713/isi-lengkap-pidato-kenegaraan-perdana-presiden-jokowi>.Diakses pada tanggal 12 Mei 2016.
- "Jokowi Buka Akses Media Asing ke Papua".<https://m.tempo.co/read/news/2015/05/10/118665037/jokowi-buka-akses-media-asing-ke-papua>.Diakses pada tanggal 17 Juli 2016.
- "Keberadaan Irian Jaya Barat Disahkan Mahkamah Konstitusi".<https://m.tempo.co/read/news/2004/11/11/05550990/keberadaan-irian-jaya-barat-disahkan-mahkamah-konstitusi>.Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.
- "Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat".<http://pauabarat.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=25444&t=1170>.Diakses pada tanggal 3 Maret 2016.
- "Kemiskinan dan Ketertinggalan Papua: KPK Harus Usut Dana Otsus".*Suara Pembaruan*, 26 Oktober 2010.
- "Kepala UP4B Ditolak Kehadirannya di Nabire".http://www.portalkbr.com/nusantara/papua/2302016_5512.html.Diakses pada tanggal 11 April 2014.
- "Kunjungan ke Merauke Jokowi Bagi 5 Sepeda Untuk Petani".<http://www.bijaks.net/news/article/1223-129910/kunjungan-ke-merauke-jokowi-bagi-bagi-5-sepeda-untuk-petani>.Diakses pada tanggal 12 Mei 2016.
- "Kunjungi Papua Barat, Presiden Jokowi Resmikan Proyek Infrastruktur".<http://www.bbc.com/indonesia/berita-indonesia/2016/04/16040-indonesia-jokowi-papua-manokwari>.Diakses pada tanggal 12 Mei 2016.
- "Luhut: Operasi Militer Langkah Terakhir Redam Konflik Papua".<http://news.okezone.com/read/2016/03/29/340/1348380/luhut-operasi-militer-langkah-terakhir-redam-konflik-papua>.Diakses pada tanggal 18 Juli 2016.

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

- “Masalah Tanah Jadi Hambatan Pembangunan di Papua”.<https://www.pasificpos.com/info-papua/6849-masalah-tanah-jadi-hambatan-pembangunan-di-papua>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- “Menkopolhukam Jamin Independensi Tim Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua”.<http://beritanusasatu.com/menkopolhukam-jamin-independensi-tim-terpadu-penyelesaian-pelanggaran-ham-papua/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2016.
- “Pajak Freeport Bisa Tutupi Dana Otsus Papua”. [http://wartaekonomi.co.id/read/2016/04/01/95615 / pajak-freeport-bisa-tutupi-dana-otsus-papua.html](http://wartaekonomi.co.id/read/2016/04/01/95615/pajak-freeport-bisa-tutupi-dana-otsus-papua.html).Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- “Papua- 50 Ribu Hektare Sawah di Merauke Dikembangkan Pemerintah Kabupaten”. <https://www.selasar.com/politik/papua-50-ribu-hektare-sawah-di-merauke-dikembangkan-pemerintah-kabupaten>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2016.
- “Papua New Guinea”. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pp.html>.Diakses pada tanggal 21 November 2016.
- Pemerintah Kembangkan 5 Cluster untuk Percepat Otsus Papua.<https://nasional tempo.co/read/news/2010/12/01/078296068/pemerintah-kembangkan-5-cluster-untuk-percepat-otsus-papua>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.
- “Pemerintah Putuskan Bentuk Desk Khusus Papua”.<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/02/lvkszd-pemerintah-putuskan-bentuk-desk-khusus-papu>.Diakses pada tanggal 11 April 2014.
- “Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua Tak Sesuai Kebutuhan”.<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah.Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.Kebutuhan>.Diakses pada tanggal 17 Juli 2016.
- “Pendamping Jadi Penikmat Dana Respek”.<https://thebodipost.wordpress.com/2011/08/25/pendamping-jadi-penikmat-dana-respek/>.Diakses pada tanggal 16 Juli 2016.
- “Pengelolaan Dana Otsus: Program Kebijakan Strategis Pembangunan Provinsi Papua”. <http://gubernurlukasenembe.com/kebijakan-strategis/pengelolaan-dana-otsus/>.Diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

- "Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2005 di hadapan DPR RI".https://id.wikisource.org/wiki/Pidato_Kenegaraan_Presiden_Republik_Indonesia,-16-Agustus-2005.Diakses pada tanggal 1 Maret 2016.
- "Pidato Pancasila 1 Juni 1945 Bung Karno Istilah Pancasila Diusulkan Ahli Bahasa Bagian 4".<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/06/01/lm444c-pidato-pancasila-1-juni-1945-bung-karno-istilah-pancasila-diusulkan-ahli-bahasa-bagian-4>.Diakses pada tanggal 4 Juni 2011.
- "Presiden Jokowi BeriGrasi untuk Lima Tapol di Papua".<http://www.bbc.com/indonesia/berita-indonesia/2015/05/150509-papua-grasi-jokowi.shtml>.Diakses pada tanggal 12 Mei 2016.
- "Presiden Jokowi untuk Ketiga Kalinya Mengunjungi Papua".http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151230-indonesia-jokowi-papua.Diakses pada tanggal 12 Mei 2016.
- "Presiden Jokowi Tiba di Papua".http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141227-jokowi-papua-kunjung.Diakses pada tanggal 12 Mei 2016.
- "Profil Provinsi Papua". <http://indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-papua/profil-daerah?format=pdf>.Diakses pada tanggal 23 Februari 2016.
- "Profil Wilayah Provinsi Papua Barat".<http://www.rtrwpapubarat.info/fakta/pdf/asp-fisik.pdf>.Diakses pada tanggal 1 Maret 2016.
- "Putusan Sidang Putusan006PUUIV2006tgl07122006pdf".http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/Putusan/putusan-sidang_-Putusan006PUUIV2006ttgKKRrtgl07122006.pdf.Diakses pada tanggal 16 Juli 2016.
- "Respek dan Persoalan Ekonomi Rakyat".<http://muyevoice.blogspot.co.id/2012/02/respek-dan-persoalan-ekonomi-masyarakat-19.html>.Diakses pada tanggal 18 Juli 2016.
- "Sejarah Pemerintahan".<http://papubaratprov.go.id/sejarah-pemerintahan/>.Diakses pada tanggal 25 Februari 2016.
- "Sekilas Papua".<https://papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html>.Diakses pada tanggal 22 Februari 2016.
- "Sertifikat Tanah Dibagikan ke Masyarakat Papua".<http://news.metrotvnews.com/read/2016/06/23/547134/6-861-sertifikat-tanah-dibagikan-ke-masyarakat-papua>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

- “Tak Diproteksi Wirausaha Asli Papua Sulit Berkembang”.<http://papua.business/2015/tak-diproteksi-wirausaha-asli-papua-sulit-berkembang.html>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- “Tanah Adat Masyarakat Papua Barat Disertifikasi”.<http://news.metrotvnews.com/daerah/dN6OQYqb-tanah-adat-masyarakat-papua-barat-disertifikasi>.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- “Tingkatkan Perekonomian Provinsi Papua Barat, Bank Indonesia Buka Kantor Perwakilan”.http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_169914.aspx.Diakses pada tanggal 9 Desember 2016.
- Thoha, Miftah. “Palang Pintu Otonomi Khusus Bali”.<http://www.lenteratimur.com/palang-pintu-otonomi-khusus-bali>.Diakses pada tanggal 10 Juli 2013.
- “Tok MA Lepaskan 21 Anggota DPRD Papua Barat di Kasus Korupsi APBD”.
<http://news.detik.com/berita/3200001/tok-ma-lepaskan-31-anggota-dprd-papua-barat-di-kasus-korupsi-apbd>.Diakses pada tanggal 16 Juli 2016.
- “Tokoh Adat Tabi Pertanyakan Pembagian Kuota 14 Kursi DPRD”.<https://www.pasificpos.com/headline/7006-tokoh-adat-tabi-pertanyakan-pembagian-kuota-14-kursi-dprd>.Diakses pada tanggal 8 Desember 2016.
- “Wow 9 dari 45 Anggota DPRD Papua Barat Ternyata Berstatus Terpidana”.
<http://sp.beritasatu.com/home/wow9-dari-45-anggota-dprd-papua-barat-ternyata-berstatus-terpidana/66338>.Diakses pada tanggal 16 Juli 2016.

Daftar Wawancara

- Abner Mansai, tanggal 27 Agustus 2015 di Jayapura.
- Adriana Elisabeth, tanggal 29 Januari 2016 di Jakarta.
- Anggota DPRD, tanggal 22-23 Juni 2011 di Jayapura.
- Anggota MRP, 22 Juni 2011 di Jayapura.
- Bappeda Provinsi Papua, tanggal 26 Agustus 2014 di Jayapura.
- Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 22 Juni 2011 di Jayapura.
- Christina Wakarmamo, dosen Uncen, 27 Agustus 2015 di Jayapura.
- Dinas Kesehatan, tanggal 27 Agustus 2014 di Jayapura.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 Maret 2014 di Wamena.

RIRIS KATHARINA

- Dinas Pendidikan Provinsi Papua, tanggal 27 Agustus 2014 di Jayapura.
- Djohermansyah Djohan, tanggal 20 Oktober 2016 di Jakarta.
- Eduard Fonotaba, Wakil Kepala UP4B, tanggal 27 Agustus 2014 di Jayapura.
- Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, Ketua Tim Pemantau Otsus Papua, tanggal 27 Mei 2016 di Jakarta.
- Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, tanggal 26 Mei 2016 di Jakarta.
- Fraksi Partai Golkar DPRP, tanggal 20 Juni 2011 di Jayapura.
- Jacob Esau Komigi, anggota DPD RI, tanggal 10 Oktober 2016 di Jakarta.
- Jhon Ibo, Ketua DPRP, tanggal 23 Juni 2011 di Jayapura.
- Ketua MRP, tanggal 15 Juni 2016 di Jayapura.
- Lambertus Fonotaba, Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Aparatur BKD Provinsi Papua, tanggal 26 Agustus 2015 di Jayapura.
- Luhut Panjaitan, Menkopolkam, tanggal 20 Juni 2016 di Jakarta.
- Maria Kaize, masyarakat adat Papua, tanggal 10 Maret 2016 di Jakarta.
- N.D. Mandacan, Sekda Papua Barat, tanggal 7 September 2015 di Manokwari.
- Pater Neles Tebay, tanggal 14 Juni 2016, di Jakarta.
- Rita Teurupun, Sekda Kaimana, tanggal 9 September 2015 di Kaimana.
- Simon Patrice Morin tanggal 12 Mei 2016 via telepon.
- Socrates Sofyan Yoman, tanggal 1 Februari 2016 di Jakarta.
- Sodjuangan Situmorang, mantan Dirjen Otda Kemendagri, tanggal 26 Oktober 2016 di Jakarta.
- Sudarsono Hardjosoekarto, mantan Dirjen Kesbangpol Kemendagri yang menjadi wakil pemerintah pada saat pembahasan RUU, tanggal 23 Februari 2016.
- Thaha AlHamid, tanggal 13 Juni 2016 di Jakarta.
- Tito Kanaviar, Kepala BNPT, tanggal 13 Juni 2016 di Jakarta.
- Tokoh agama, 2 Februari 2016 di Jakarta.
- Wakil Gubernur Papua, tanggal 15 Juni 2016, di Jayapura.
- Weynand B Watory, anggota Fraksi Gabungan Pikiran Rakyat DPRP, tanggal 23 Juni 2011 di Jayapura.

INDEKS

A

Aceh, 3, 49, 51, 52, 151, 168, 220
adat, 6, 67, 122, 123, 124, 141, 176,
178, 202, 203
kepala, 178
masyarakat, 6, 72, 117, 121, 123,
124, 182, 203
peradilan, 6, 130, 159, 203
tanah, 123, 124, 182
Angka Melek Huruf, 15, 132
Amberbaken, 60
Amungme, 60, 185
Anggi, 60
Ansus, 60
Arnold Ap, 69
Asmat, 56, 60, 67, 80, 82, 180
Assymetrical Decentralization, 41
Ayamaru, 59, 60
Amerika, 46, 58

B

Bambang Dharmono, 155
Bauzi, 60
Benny Wenda, 187
Biak, 57, 59, 60, 117
Badan Pusat Statistik (BPS), 11
Buchtar Tabuni, 187

C

catatan, 17, 50, 87, 103, 149, 175
curang, 139

D

Dani, 60, 67
deliberative, 1, 26
desentralisasi, 2, 3, 41, 42, 44, 46,
50, 57, 222
asimetris, 3, 46, 47, 48, 51, 52,
224, 230
fiskal, 41, 48, 154
politik, 41
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 5,
30, 152, 155, 158
distrik, 80, 81, 83, 131, 189
Dewan Perwakilan Rakyat Papua
(DPRP), 21, 30, 71, 85, 87, 91,
92, 93, 96, 102, 122, 143, 152,
175, 199, 207, 210, 222
Dryzek, 26, 27, 28

E

Edison Kladius Waromi, 187
ekonomi rakyat, 206
Eko Prasajo, 44, 45
Empur, 60

Enggros, 60

F

Fadli Zon, 170

Ferry Awom, 69

formulasi, 1, 25, 28, 34, 37, 211, 218,
224, 226

Frank Fischer, 1, 27, 29

Freeport Indonesia, 121, 168

Fuyu, 60

G

gerakan, 45, 51, 54, 102, 186

gunung, 58, 92, 131, 193

grasi, 127, 164, 165

Grindle, 26, 30, 31, 36, 38, 39, 79

H

Hans Bomay, 69

Hatam, 60

Haula Rosdiana, 122

Hak Asasi Manusia (HAM), 2, 7, 19,
124

hutan, 58

I

International Coalition for Papua
(ICP), 128

Irian Jaya, 3, 4, 24, 55, 57, 62, 64, 65,
69, 76, 143, 150

J

Jacob Rumbiak, 187

Joko Widodo, 21, 88, 116, 119, 120,
124, 127, 135, 141, 161, 165,
167, 170, 183, 204, 216, 217,
218

K

Kaimana, 59, 66, 82, 105, 120, 163

kampung, 80, 81, 83, 98, 194, 229
elite, 194, 210

kebar, 60

kebijakan, 1, 3, 4, 16, 23, 25, 26, 27,
138, 141, 146, 151, 155, 200,
212, 216, 222, 227

afirmatif, 7

deliberatif, 26

otsus, 1, 16, 19, 20, 79, 83, 110,
123, 125, 128, 176, 196, 206,
215, 218, 224, 227

partisipatif, 3, 4

publik, 24

sentralisasi, 2

Komoro, 60

Korowai, 60

L

Leonie Tanggahma, 187

Loudwick Mandatjan, 69

Luhut Panjaitan, 100, 113

M

Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), 2, 3, 69, 70

Majelis Rakyat Papua (MRP), 6, 16,
19, 21, 30, 72, 83, 92, 100, 102,

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

104, 123, 130, 145, 148, 153,
176, 177, 203, 209
masyarakat adat, 6, 72, 117, 121,
123, 182, 203
Mahkamah Konstitusi, 66
Manokwari, 10, 57, 65, 156, 189,
214, 228
Manyambouw, 60
Max Tago, 69
Mazmanian, 33
Mee, 60
Mecky Salossa, 69
Megawati Soekarnoputri, 66, 101,
106, 113, 125, 129, 147, 198,
222
Melanesia, 60, 186
Melanesian Aparehead Group (MSG),
186, 187
Merdei, 60
Meyakh, 60
Moskona, 60
Muyu, 59, 60

N

Nafri, 60
Nakamura, 25, 27, 29, 30, 39, 146,
188, 208
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), 1, 5, 63, 198, 205

O

Obeth Tabuni, 69
Octavianus Mote, 187
Orang Asli Papua (OAP), 105, 106,
117, 118, 123, 129, 139, 157,
205
Oransbari, 60
Organisasi Papua Merdeka (OPM),

185
Otonom, 42, 43, 68, 80, 84, 104, 105,
173, 204
Otonomi khusus (Otsus), 1, 3, 5, 8,
11, 16, 19, 22, 23, 41, 48, 52, 53,
55, 73, 120, 156, 167, 220
Otsus Plus, 92, 100, 104, 116, 158,
169, 188, 191, 213

P

Palang, 167, 181, 182
Paniai, 57, 60, 65
Papua, 1, 3, 5, 6, 13, 15, 24, 30, 51,
54, 55, 57, 60, 64, 69, 71, 76, 79,
81, 94, 97, 102, 105, 111, 114,
117, 124, 130, 138, 141, 143,
163, 165, 176, 179, 183, 190,
198, 199
Papua Barat, 10, 12, 13, 16, 19, 22,
30, 55, 65, 66, 67, 77, 93, 100,
103, 105, 108, 110, 136, 141,
151, 167, 190
Pemberontak, 54
Pesisir, 58, 81, 138, 223
Phil Erari, 94
Priyo Budi Santoso, 168
Puncak Jaya, 57, 65, 125, 127, 143,
150
Public Policy, 1, 23, 26, 28, 29, 218,
224

Q

Quebec, 48, 49, 231

R

Ransiki, 60
Rex Rumakiek, 187

RIRIS KATHARINA

Riris Khatarina, 251

S

sagu, 58, 163

Sumber Daya Manusia (SDM), 45, 93,
118, 139, 182, 191

Sentani, 60

Simon Patrice Morin, 94

Sorong, 10, 57, 60, 65, 66, 118

Souk, 60

T

Tabi, 85

Tebay, 22, 186

Theys Hiyo Eluay, 69

Thom Wainggai, 69

Tobati, 60

transmigrasi, 91, 139

U

Unit Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (UP4B), 21, 106,
118, 140, 154, 155, 157, 199

United Liberation Movement for
West Papua (ULMWP), 186, 187

V

Vanuatu, 170, 186

Velix Wanggai, 173

W

Wamesa, 60

Wandamen, 60

Waropen, 57, 60

Widjojo, 80, 103, 148, 152, 207

Willem Onde, 69

Wondawa, 60

Y

Yoedhi Swastono, 173

Yogyakarta, 51, 52

Yoman, 128

Yonas Alfons Husi, 85

Yorrys Raweyai, 94

Susilo Bambang Yudhoyono, 21, 76,
149, 151, 153, 156, 158, 161,
168, 199, 208, 217

Yusuf Tanawani, 69

Z

zona, 154

TENTANG PENULIS



RIRIS KATHARINA adalah Peneliti DPR RI. Melakukan riset dengan topik Kebijakan Publik, Keparlemenan, Reformasi Administrasi, Birokrasi, Pemerintahan Lokal, Desentralisi Asimetris, Papua.

Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan

Memberikan orientasi bagi politisi, anggota parlemen, dan staf, serta di kalangan LSM terkait cara kerja keparlemenan

Keparlemenan

Aktif dalam perancangan berbagai Rancangan Undang-Undang;
Menganalisis Mekanisme Kerja Parlemen

Legislative Drafting

Sebagai pelatih perancangan peraturan perundang-undangan dengan sertifikasi internasional bagi anggota parlemen (DPR, DPD) dan pemerintah daerah(DPRD), LSM, pejabat publik, dan para perancang peraturan perundang-undangan di Kementerian/Lembaga.

Professional Qualification

- Lebih dari 20 tahun pengalaman sebagai peneliti di Parlemen (DPR RI) dengan menyediakan hasil riset dan analisis yang dibutuhkan.

RIRIS KATHARINA

Berbagai publikasi ilmiah dan populer telah diterbitkan dalam berbagai buku, jurnal, koran, dan majalah.

- Berpengalaman dalam memberikan pelatihan bagi para anggota DPR, DPRD, staf parlemen, partai politik, dan LSM lebih dari 20 tahun.
- Berpengalaman dalam mengelola pelatihan di lembaga pemerintahan, parlemen, dan LSM.
- Memiliki kemampuan personal *excellent* dan mampu berkomunikasi dengan sangat efektif di setiap level.
- Berpengalaman dalam mempresentasikan hasil riset.
- Mampu bekerjasama dan memiliki jaringan kerja dengan anggota parlemen dan pejabat pemerintahan.
- Memiliki kemampuan membangun jaringan dan memelihara hubungan dengan lembaga donor yang relevan, akademisi, organisasi media, LSM, dan pemangku kepentingan yang terkait.
- Berpengalaman dalam bekerja dengan *multy public stakeholders*.
- Berpengalaman dalam melakukan advokasi dan mempengaruhi para pembuat kebijakan.
- Berpengalaman dalam memfasilitasi *workshop* dan pelatihan.

Pendidikan Formal

- 2017: Doktor (Dr.), Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, dengan disertasi berjudul "Analisis Kebijakan Otonomi Khusus Papua (2001-2016) dalam Perspektif *Deliberative Public Policy*"
- 2004: Magister Sains (M.Si), Ilmu Administrasi kekhususan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, dengan judul tesis "Komisi Ombudsman Nasional: Evaluasi terhadap Formasi dan Implementasi Kebijakan Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000)"

MENAKAR CAPAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

- 1996: Sarjana Sosial (S.Sos.), Ilmu Administrasi Negara, Universitas Diponegoro, dengan judul skripsi "Implementasi Kebijakan Pemukiman Pengganti (Pemukti)"